

Pengaruh IPM dan Kemandirian Keuangan Terhadap Financial Sustainability Pemerintah Kota Yogyakarta

Ernawati¹

Bangun Putra Prasetya²

^{1,2} Universitas Widya Mataram

Email: er.wati.sch91@gmail.com¹, bangunputraprasetya@gmail.com²

Abstract

This research aims to examine the factors that influence Financial Sustainability in the Yogyakarta City Government. The factors chosen from a financial perspective are financial independence and a social aspect, namely the HDI or Human Development Index of the Yogyakarta City Government. The research sample used was the HDI and Financial Independence of the Yogyakarta City Government in 2014 - 2022. The data analysis method used was SPSS version 27. Based on the research results, it can be partially concluded that the HDI (Human Development Index) has no effect on Financial Sustainability. Meanwhile, Financial Independence partially influences Financial Sustainability. Simultaneously, the HDI (Community Development Index) and Financial Independence have a significant effect on the Financial Sustainability of the Yogyakarta City Government.

Keywords: *Financial sustainability, Financial Independence, HDI (Human Development Index)*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi Finansial Sustainability pada Pemerintah daerah Kota Yogyakarta. Faktor yang dipilih dari segi keuangan yaitu tentang kemandirian keuangan dan segi sosial yaitu IPM atau Indeks Pembangunan Manusia yang ada Pemerintah Kota Yogyakarta. Sampel penelitian yang digunakan adalah IPM dan Kemandirian Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2014 – 2022. Metode analisis data yang digunakan adalah SPSS versi 27. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan secara parsial IPM (Indeks Pembangunan Manusia) tidak berpengaruh terhadap Financial Sustainability. Sedangkan Kemandirian Keuangan secara parsial berpengaruh terhadap Financial Sustainability. Secara Simultan IPM (Indeks Pembangunan Masyarakat) dan Kemandirian Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Financial Sustainability Pemerintah Kota Yogyakarta.

Kata Kunci: *Financial Sustainability, kemandirian keuangan, IPM (Indeks Pembangunan Manusia)*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara kesatuan yang menganut penyelenggaraan pemerintahan secara desentralisasi yaitu pembagian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar daerah lebih mandiri. Menurut UU nomor 23 tahun 2014 dalam pasal 12 menerangkan bahwa pemerintah daerah dapat melaksanakan kewenangan yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan Kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta urusan sosial. Pemerintah daerah yang di maksud diatas adalah pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Keberlanjutan keuangan atau Financial Sustainability pada pemerintahan menjadi sebuah tantangan bagi pemerintah agar mengelola keuangan dengan sebaik-baiknya.

Dalam Wardhani (2020) disebutkan bahwa kondisi keuangan yang berkelanjutan atau stabil serta tidak memberikan beban kepada masyarakat generasi selanjutnya adalah kondisi keuangan yang baik. Merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 terdapat Visi Indonesia Emas 2045 yaitu Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan yang mempunyai arti Lestari dan seimbang antara pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan. Ekonomi Indonesia diharapkan bertransformasi menjadi ekonomi berbasis pengetahuan dan teknologi yang menghasilkan barang dan jasa bernilai tinggi secara inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu penting sekali bagi pemerintah daerah untuk bisa menjaga keuangan berkelanjutan (Financial Sustainability) sehingga kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan public dapat dijalankan secara terus menerus.

Pemerintah daerah terdiri dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Salah satunya adalah Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta yang merupakan salah satu kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sesuai dengan UU otonomi daerah maka Pemerintah Kota Yogyakarta menjalankan pengelolaan keuangan daerah secara mandiri. Dalam menjalankan kewenangan-kewenangannya Pemerintah Kota memperoleh anggaran yang berasal dari Pendapatan Daerah serta Pendapatan Transfer dari pemerintah pusat. Semua pendapatan yang diperoleh digunakan dalam pembelanjaan dalam berbagai bidang. Dalam kurun waktu 5 tahun yaitu tahun 2014 -2022 diperoleh bahwa dalam penganggaran pemerintah kota menunjukkan adanya defisit anggaran, berikut adalah rincian dari defisit masing tahun anggaran.

Tabel 1. Perbandingan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Th 2014 -2022

Tahun Anggaran	Anggaran Pendapatan	Anggaran Belanja Daerah	Surplus/Defisit
2014	1.459.742.435.083,81	1.336.610.467.867,75	123.131.967.216,06
2015	1.434.009.588.218,85	1.539.699.344.285,44	-105.689.756.066,59
2016	1.577.679.933.045,2	1.665.420.970.708,79	-87.741.037.663,59
2017	1.659.277.141.816,66	1.484.920.699.126,17	174.356.442.690,49
2018	1.698.804.931.325,00	1.795.669.529.194,00	- 96.684.597.869,00
2019	1.754.768.489.387,00	1.943.940.157.146,00	- 189.171.667.759,00
2020	1.636.876.158.348,00	1.837.219.591.471,00	- 200.343.433.123,00
2021	1.631.391.993.906,00	1.944.826.298.734,00	- 313.434.304.828,00
2022	1.812.383.542.864,00	2.049.712.899.206,00	- 237.329.356.342,00

Sumber data : Penjabaran APBD Pemerintah Kota Yogyakarta th 2014-2022

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 9 tahun dari 2018 sampai dengan 2022 dalam perencanaan APBD Kota Yogyakarta terdapat lebih banyak defisit anggaran. Defisit anggaran dapat menyebabkan kurang maksimalnya pembelanjaan daerah sehingga dapat berakibat pada berkurangnya pelayanan kepada masyarakat. Defisit anggaran pada pemerintah dapat ditutupi dengan pinjaman daerah, akan tetapi tanpa adanya pengelolaan sumber daya yang dimiliki maka dapat mengakibatkan keuangan daerah yang memburuk. Untuk itu pemerintah daerah perlu mengelola keuangan dengan baik, dalam Wardhani (2020) disebutkan bahwa kondisi keuangan yang berkelanjutan atau stabil serta tidak memberikan beban kepada masyarakat generasi

selanjutnya adalah kondisi keuangan yang baik. Rodriguez (2014) menyatakan tidak menambah beban kepada masyarakat di periode selanjutnya disebut intergenerational equity atau ekuitas antar generasi, faktor ini di anggap penting dalam rangka evaluasi keberlanjutan keuangan di sebuah pemerintahan untuk menilai sebuah kelayakan keuangan di masa mendatang sehingga dapat memberikan layanan publik yang terbaik.

Dalam penelitian terdahulu Wardhani & Payamta (2020) mengemukakan factor-faktor yang mempengaruhi financial sustainability di sektor pemerintahan baik dari segi demografi, ekonomi, sosial dan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan Jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia serta Produk Domestik Regional Bruto tidak berpengaruh terhadap financial sustainability. Kemandirian Keuangan berpengaruh terhadap financial sustainability. Aryasi dkk (2023) mengemukakan pada penelitiannya bahwa Kemandirian Keuangan dan Efisiensi Keuangan berpengaruh positif terhadap financial sustainability pada Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan kinerja keuangan berpengaruh negatif terhadap financial sustainability.

KAJIAN LITERATUR

Konsep sustainability menjadi topik yang menarik perhatian dalam dua dekade terakhir karena berkaitan dengan kegiatan-kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi kehidupan di masa mendatang. Konsep ini dalam Zapata dan Munoz (2018) keberlanjutan pada 3 konsep yaitu keberlanjutan sebagai kriteria pedoman untuk tindakan manusia, sebagai tujuan manusia dan sebagai objek. Dalam sebuah organisasi seperti dalam pemerintahan dibutuhkan sebuah acuan tentang keberlanjutan atau *sustainability* sehingga kedepannya dapat memberikan pelayanan terus menerus kepada masyarakat.

Suharto (2020) menyatakan bahwa Indeks Pembangunan manusia adalah perbandingan harapan hidup, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara yang digunakan untuk indikator dalam menilai aspek kualitas dari pembangunan dan mengklasifikasikan apakah sebuah negara termasuk negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup manusia dalam suatu wilayah. Wardhani dkk (2020) mendapatkan hasil dari penelitiannya menunjukkan IPM berpengaruh positif terhadap financial sustainability.

Menurut Sawitri dkk (2023) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah di hitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi serta pinjaman daerah. Wardhani dkk (2020) menjelaskan bahwa Kemandirian Keuangan berpengaruh positif terhadap Financial Sustainability. Lhutfi dan Sugiharti (2022) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Kemandirian Keuangan berpengaruh positif terhadap Financial Sustainability. Aryasi dkk (2023) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa Kemandirian Keuangan berpengaruh positif terhadap Financial Sustainability.

METODE

Metode penelitian menggunakan metode penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. pendekatan penelitian asosiatif menurut Sugiyono (2019) adalah merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian asosiatif dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Kemandirian Keuangan terhadap Financial Sustainability di Pemerintah Kota Yogyakarta. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta periode 2014-2022. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah non probability sampling, dengan menggunakan jenis purposive sampling.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi yaitu memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi yang digunakan adalah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2014 sampai dengan 2022 melalui website JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Kota Yogyakarta.

Pengujian dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis regresi linier berganda pada SPSS 27 untuk selanjutnya digunakan pengujian hipotesis. Uji hipotesis yang terdiri dari uji t dan Uji F. Jika semua syarat terpenuhi, berarti model analisis layak digunakan. Uji signifikansi hipotesis dengan syarat standar eror 5% dan dinyatakan signifikan jika di bawah 5%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji T (T-test)

Menurut Sahir (2021) uji t adalah pengujian terhadap koefisien regresi secara parsial untuk mengetahui signifikansi secara parsial atau masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Untuk menentukan kriteria pengujian hipotesis penelitian:

1. Hipotesis diterima jika t signifikan $< 0,05$
2. Hipotesis ditolak jika t signifikan $> 0,05$

Berdasarkan hasil Uji T dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2 Hasil Uji T

Variable	T	Sig.	Keterangan
Constant	-0,785	0,476	
IPM	1,696	0,165	Tidak Berpengaruh
Kemandirian Keu	6,264	0,003	Berpengaruh

Berdasarkan pengujian, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diperoleh nilai t-hitung sebesar 1,696 dengan tingkat Signifikansi sebesar $0,165 > 0,05$ yang berarti tidak berpengaruh terhadap Financial Sustainability Pemerintah Kota Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat Indeks Pembangunan Masyarakat di Kota Yogyakarta berbanding terbalik dengan Financial Sustainability Pemerintah Kota Yogyakarta. Jika nilai IPM meningkat maka nilai Financial Sustainability menurun, begitu juga sebaliknya. Hal ini berkaitan dengan beban pemerintah yang meningkat seiring dengan naiknya nilai Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil pengujian nilai Kemandirian Keuangan memperoleh nilai t-hitung sebesar 6,264 dan tingkat signifikansi sebesar $0,003 < 0,05$ yang mempunyai arti bahwa Kemandirian Keuangan berpengaruh positif terhadap Financial Sustainability Pemerintah Kota Yogyakarta. Jika nilai kemandirian keuangan meningkat maka Financial Sustainability juga akan meningkat.

Uji Signifikansi Simultan (Uji F Statistik)

Menurut Sahir (2021) uji hipotesis secara simultan bertujuan untuk mengenali terdapat tidaknya pengaruh dengan cara bersama-sama (simultan) variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil pengujian menggunakan uji F dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3 Hasil Uji F

Model	F	Sig.	Kesimpulan
Regression	10,534	0,021 ^b	Signifikan

Dari tabel tersebut, diperoleh F hitung sebesar 10,534 dan signifikansi sebesar 0,021. Terlihat bahwa nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) dan Kemandirian Keuangan (KK) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap *Financial Sustainability Ratio* (FSR) Kota Yogyakarta.

Pembahasan

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Financial Sustainability Pemerintah Kota Yogyakarta

Hasil pengujian hipotesis pertama pada penelitian ini menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh terhadap Financial Sustainability di Pemerintah Kota

Yogyakarta. Hal ini sejalan dengan penelitian penelitian Dinar dan Payamta (2020) yang menjelaskan bahwa IPM tidak berpengaruh pada Financial Sustainability Ratio (FSR). IPM menjadi tolak ukur atas kualitas hidup masyarakat, akan tetapi hal ini tidak mempengaruhi pada kemampuan pemerintah dalam menjalankan pelayanan yang berkualitas secara berkelanjutan. Pengaruh Indeks Pembangunan Masyarakat terhadap FSR berdasarkan data yang di ambil di Kota Yogyakarta menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan nilai IPM tidak berpengaruh pada naiknya Financial Sustainability Ration (FSR). Kenaikan IPM menunjukkan meningkatnya pelayanan pemerintahan dalam pendidikan, kesehatan serta harapan hidup masyarakat, hal ini harus di imbangi dengan kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan agar dapat menjaga stabilitas keuangan berkelanjutan.

Pengaruh Kemandirian Keuangan terhadap Financial Sustainability Pemerintah Kota Yogyakarta

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa kemandirian keuangan berpengaruh positif terhadap Financial Sustainability di Pemerintah Kota Yogyakarta. Penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Dinar dan Payamta (2020) yang menjelaskan bahwa Kemandirian keuangan berpengaruh positif terhadap *Financial Sustainability*. Selain itu Putri dan Yeви (2023) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa Kemandirian Keuangan berpengaruh positif terhadap *Financial Sustainability*. Hasil penelitian dari Iqbal dan Harpa (2022) juga menjelaskan bahwa Kemandirian Keuangan berpengaruh positif terhadap *Financial Sustainability*. Hasil statistik dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Kemandirian Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Financial Sustainability. Semakin tinggi tingkat kemandirian daerah maka semakin stabil pemerintah daerah dalam menjalankan keberlanjutan keuangannya. Pemerintah yang mandiri adalah pemerintah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah yang besar sehingga tidak bergantung pada dana pemerintah pusat.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pada hasil penelitian yang di presentasikan pada pengolahan data maka dapat disimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak berpengaruh terhadap Financial Sustainability pada Pemerintah Kota Yogyakarta. Kemandirian Keuangan berpengaruh positif terhadap Financial Sustainability pada Pemerintah Kota Yogyakarta. Hal ini dikarenakan kemandirian keuangan mempengaruhi kemampuan daerah dalam memberdayakan potensi yang dimiliki sehingga meminimalkan ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Semakin mandiri suatu daerah maka sebaik baik dalam meningkatkan *financial sustainability*.

DAFTAR RUJUKAN

- Aryasi, P. P., Periansya, P., & Dwitayanti, Y. (2023). Pengaruh Kemandirian, Efisiensi dan Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Bagian Selatan. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(2).
- Hodijah, S., & Angelina, G. P. (2021). Analisis pengaruh ekspor dan impor terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 10(01), 53-62.
- Lhutfi, I., & Sugiharti, H. (2022). Financial sustainability of local governments in Indonesia. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset) Vol*, 14(1).
- Pertiwi, N. (2017). Implementasi Sustainable Development di Indonesia. Bandung : Pustaka Ramadhan
- Radita Alma, L. (2019). Ilmu Kependudukan. Malang : Wineka Media
- Rodríguez Bolívar, M. P., López Subires, M. D., Alcaide Muñoz, L., & Navarro Galera, A. (2021). The financial sustainability of local authorities in England and Spain: A comparative empirical study. *International Review of Administrative Sciences*, 87(1), 97-114.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi penelitian*. Yogyakarta : Penerbit KBM Indonesia.

- Solechah, W. M., & Sugito, S. (2023). Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan sebagai Kepentingan Nasional Indonesia dalam Presidensi G-20. *Dialektika: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 8(1), 12-23.
- Suharto, R. B., & SE, S. (2020). Teori Kependudukan. *Kalimantan Timur: Rv Pustaka Horizon*.
- Suwito, S. (2020). Pengantar Demografi. Malang : Ediide Infografika
- Tsauri, S. (2013). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jember : STAIN Jember Press
- Wardhani, D. T., & Payamta, P. (2020). Menguji Faktor Determinan Financial Sustainability pada Sektor Pemerintah. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 4(1), 13-27.
- Yuniarti, P., Wianti, W., & Nurgaheni, N. E. (2020). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(3), 169-176.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & RND. Bandung: Alfabeta.
- UU nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
- Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
- Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
- Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022